

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan kendaraan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak diatur secara khusus, namun tersirat dalam Pasal 134 dan Pasal 135 yang mengatur hak utama di jalan serta kewenangan kepolisian. Kewenangan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan peraturan internal kepolisian sebagai bagian dari fungsi pelayanan publik. Ketidadaan pengaturan khusus mengenai pengawasan terhadap masyarakat sipil menyebabkan pelaksanaannya didasarkan pada pertimbangan urgensi, keselamatan, ketertiban lalu lintas, dan kepentingan umum sesuai prosedur yang berlaku.
2. Urgensi pengaturan pengawasan kendaraan terhadap masyarakat sipil bertujuan menjamin keamanan, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas dalam kondisi tertentu yang berisiko. Pemberian pengawasan didasarkan pada penilaian urgensi dan kebutuhan objektif dengan mengacu pada Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta harus dilaksanakan secara selektif dan sesuai standar operasional prosedur.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkhusus kepada Satlantas Polres Bojonegoro adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan pengawalan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih bersifat implisit melalui Pasal 134 dan Pasal 135, sehingga diperlukan regulasi yang lebih rinci dan tegas, khususnya terkait pengawalan masyarakat sipil. Oleh karena itu, Polri perlu memperkuat regulasi turunan melalui Peraturan Kapolri dan SOP agar pelaksanaannya seragam, disertai sosialisasi, transparansi prosedur guna meningkatkan akuntabilitas dan mencegah penyimpangan. Pengawalan dapat dilakukan dalam keadaan mendesak, sepanjang didasarkan pada alasan objektif dan dilaksanakan secara proporsional tanpa mengurangi hak pengguna jalan lainnya.
2. Satlantas Polres Bojonegoro disarankan menyusun pedoman urgensi pengawalan berbasis indikator yang objektif dan terukur, yang dalam implementasinya harus dilakukan secara profesional, transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi petugas Patwal melalui pelatihan dan pengawasan yang berkelanjutan, serta penguatan edukasi dan transparansi informasi kepada masyarakat guna menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Muhaimin, H. *METODE PENELITIAN HUKUM*. Mataram: Mataram University Pres, 2020.

Penyusun, Tim. “Naskah Akademik Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.” Palu, 2024.

Sony, Edy, Indrawati, Mairul, Asri Elies Alamanda, and Sukmareni. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edited by Rizky Tri Anugrah Bhakti. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024.

2. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkap) Nomor 9 tentang
Pengaturan Penjagaan pengawalan dan Patroli Lalu Lintas

Peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor
3 Tahun 2011 tentang Pengawalan

3. Jurnal/Artikel Jurnal

Agustina, Ria, and Gunawan Hadi Purwanto. “Kejahatan Impersonation Terhadap Public Figure Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Bojonegoro)” 6 (2024).

Atribusi, Kewenangan, and Delegasi D A N Mandat. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat” 2, no. 3 (2020): 92–99.
<https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

Ateng Syafrudin, 2000. Menuju Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung jawab. Jurnal Pro Justisia. Bandung. Universitas Parahyangan. Hal; 22

- Barthos, Megawati, Metro Jakarta Pusat, and Jakarta Pusat. "557792-Peranan-Polisi-Lalu-Lintas-Dalam-Meningk-2494Db2F" 4, no. 22 (2018).
- Bisri, Mashur Hasan, Bramantyo Tri Asmoro, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam, Raden Rahmat, Program Studi, Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam, and Raden Rahmat. "Etika Pelayanan Publik Di Indonesia" 1, no. 1 (2019): 59–76.
- Dm, Mohd Yusuf. "Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia" 1 (2024): 149–80.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Tadulako. "Dalam Pengaduan Tindak Pidana (Studi Pada Polda Sulteng)" 2, no. 2 (2025): 197–206.
- Kuntiwi, Fina Anista, and Gunawan Hadi Purwanto. "Urgensi Dan Tantangan Pembentukan Kementerian Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia : Purusan Mahkamah Konstitusi No : 67 / PUU-XXII / 2024" 8, no. 2 (2025): 170–81.
- Lalu, Tentang, Lintas Dan, Angkutan Jalan, Marcello Edward Rukmanto, Eugenius Paransi, and Ronald E Rorie. "No Title" 2, no. 1 (2016).
- Manan, Bagir. "Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2 (2015): 626–43.
- Nur, Sri, and Hari Susanto. "Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan" 3, no. 3 (2020): 430–41.
- Pascasarjana, Program Studi, Sekolah Tinggi, and Ilmu Kepolisian. "Pemahaman Kedudukan Dan Fungsi Polri Dalam Struktur Organisasi Sistem Kenegaraan" 17, no. 89 (2023).
- Perencanaan, Bagian, and Polres Kutai. "No Title," n.d.
- Putra, H A, and A S Nugroho. "Peran Polisi Lalu Lintas Sebagai Upaya Penanganan Dan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas." *JURNAL MADANI HUKUM - Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 59–69.
<http://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/view/86%0Ahttp://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jmh/article/download/86/63>.

Rahmandani, Fahdian, and Universitas Negeri Yogyakarta. “Fikri : Jurnal Kajian Agama , Sosial Dan Budaya” 4 (2019).

Ridwan HR, 2014. Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Rajawali Pers. Jakarta. Hal ; 99.

Rossevelt, Franklin Asido, Dara Aisyah, Salsa Rachelia Butar-butur, Ananda Melri, Sastri Dea, Keren Ginting, Mariana Juni, et al. “SAJJANA : Public Administration Review Analisis Pengaruh Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Kepolisian (Studi Kasus : Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) Di Kota Medan)” 1, no. 2 (2024): 1–11.

Sholahudin, Farhan, Syamsul Ma’Arif, and Muhammad Ramadhan. “Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Ruas Jalan Brigjend Katamso, Kota Semarang, Jawa Tengah.” *Praxis : Jurnal Sains, Teknologi, Masyarakat Dan Jejaring* 7, no. 2 (2025): 90–97. <https://doi.org/10.24167/praxis.v7i2.12721>.

Suharyah, Hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.45

Wajib, Kepatuhan, Pajak Orang, Pribadi Dimoderasi, and Dengan Teknologi. “2* 1,2” 2, no. 2 (2022): 2065–76.

Yasin, Bukhari, Irma Mangar, Asri Elies Alamanda, Ummu Nur Kholifah, Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, and Jawa Timur. “Sosialisasi Kedudukan Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi Di Smk Gama Kedungadem,” 2025.

Yasin, Muhammad, and Universitas Mulawarman. “Analisis Strategi Komunikasi Satuan Intelijen Keamanan Polres Kutai Kartanegara Dalam Membangun Kemitraan Dengan Masyarakat Kecamatan Tenggarong” 5, no. 1 (2024): 43–50.

Zamroni, Mohammad. “Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata Mohammad Zamroni Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia.,” 2024, 495–518.

4. Website

Anita. "Tugas Polri Beserta Wewenang & Fungsinya Sesuai UU No 2 Tahun 2002." Daftar Informasi, 2019. <https://www.daftarinformasi.com/tugas-polri/>.

Aziz, Yusuf Abdhul. "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber Dan Metode." deepublish store, 2010. <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>.

Kepolisian Republk Indonsia. "Pengawasan Jalan." Polri, 2025. <https://polri.go.id/pengawasan-jalan>.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. "Siwas." Accessed December 10, 2025. <https://www.polresjogja.com/p/siwas.html>.

Kurniawan, Mukhamad, Defri Verdiono, and Rhama Purna Jatii. "Pengawasan Di Jalan Raya, Siapa Yang Berhak Dan Bagaimana Ketentuannya?" Kompas. id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/pengawasan-di-jalan-raya-siapa-yang-berhak-dan-bagaimana-ketentuannya>.

FSakhailla, Nalia. "Sirene Patwal: Penyalahgunaan Fasilitas Negara." Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/sirene-patwal-penyalahgunaan-fasilitas-negara/>.

Sani, Jihan Safhira, Najwa Sabrinna, and Thea Erin Kristy. "Kekuasaan, Kewenangan, Tanggung Jawab Dan Delegasi," 2022. <https://www.studocu.id/id/document/universitas-negeri-medan/pendidikan-manajemen-bisnis/8-kekuasaan-kewenangan-tanggung-jawab-dan-delegasi/32924938>.

Seksi Propam," 2023. <https://tribatanews.resbondowoso.jatim.polri.go.id/si-propam/>.

Tribatra News. "SI KEU." Accessed December 10, 2025. <https://polrespangandaran.id/sikeu/>.

5. Wawancara

Ipda Riki Amirudin. 2025. "Pengawasan Masyarakat Sipil". Hasil Wawancara

Pribadi: 1 Desember 2025, Satlantas Polres Bojonegoro.

Bripka Muchamad Mansgut. 2025. “Pengawasan Masyarakat Sipil”. Hasil

Wawancara Pribadi: 1 Desember 2025, Satlantas Polres Bojonegoro.